

**PENELUSURAN PERANAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
DAN *FISCALL STRESS* TERHADAP DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
2007-2011**

Fitria Yuliani Kartika

Program Pascasarjana, Universitas Stikubank Semarang
fitriayulianik@gmail.com

Gregorius Nasiansenus Masdjojo

Program Pascasarjana, Universitas Stikubank Semarang
masdjojo@unisbank.ac.id

Abstract

This study aimed to examine the effect of Local Revenue, the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and the Fiscall Stress on Fiscal Decentralization Degree of Regency/City in Central Java province on 2007-2011. The data used is Realized Budget Report of 35 district and city in the province of Central Java. Types of data used is a combination of time series and cross section data. Data is analyzed by panel regression technique. The results showed that the Local Revenue has positive and significant impact on Fiscal Decentralization Degree, the General Allocation Fund has negative and significant impact on Fiscal Decentralization Degree, the Special Allocation Fund has negative and significant impact on Fiscal Decentralization Degree, Fiscall Stress has positive and significant impact on Fiscal Decentralization Degree.

Keywords: *The Fiscal Decentralization Degree, The Local Revenue, The General Allocation Fund, The Special Allocation Fund, The Fiscall Stress.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan *Fiscall Stress* (FS) terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota yang dijadikan sampel, yang dipublikasikan melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Data tersebut untuk 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah gabungan data *time series* dan data *cross section*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap DDF, DAU berpengaruh negatif terhadap DDF, DAK berpengaruh negatif terhadap DDF, FS berpengaruh positif terhadap DDF.

Kata kunci : Derajat Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), *Fiscall Stress*.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Sebagai gambaran realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi PAD
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal
2007	21.745.667	2.094.378	9,63%
2008	25.874.659	2.356.492	9,11%
2009	27.371.996	2.661.601	9,72%
2010	42.485.920	3.014.439	7,10%
2011	37.643.874	3.728.367	9,90%

Sumber : Olahan Peneliti, 2013.

Dari gambaran ini dapat kita lihat bahwa derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah rendah sekali, karena rata-rata berada dibawah 10% dengan pola hubungan kewenangan pusat dan daerah yang bersifat instruktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan dan tingkat kemandirian daerah yang masih rendah.

Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensiekonomi daerah. Pada aspek hubungan pemerintahan pusat dan daerah ini (Elmi, 2002:55) mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). UU No.33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

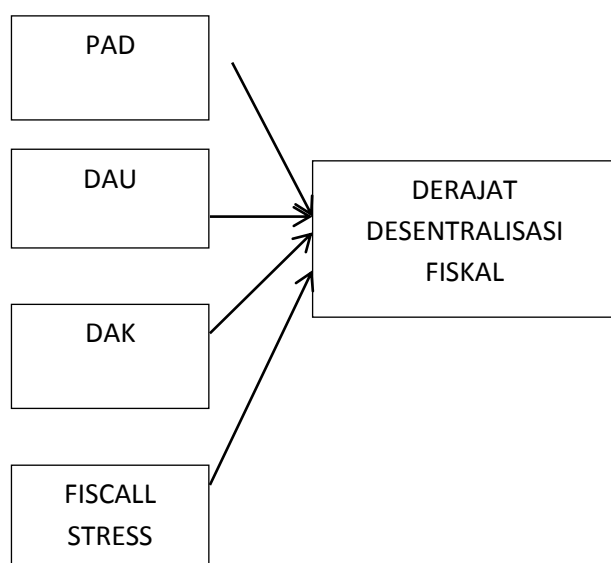
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan Pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Kebijakan otonomi daerah tersebut juga menuntut pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungannya dengan pemerintah pusat dalam hal finansial, hal tersebut menyebabkan adanya *fiscall stress* atau tekanan keuangan. Pada saat *fiscall stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto, 2004). Oleh karena itu tingginya upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*. Upaya pajak (*tax effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Model Empiris

Secara teoritis pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan *Fiscal Stress*(FS) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan dalam model empiris penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Model Empiris Penelitian



Hubungan PAD dengan Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002).

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan UU dan PP tersebut, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik. Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, Daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak (kecuali untuk Provinsi) dan retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang .

Secara umum dari argumentasi diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: PAD berpengaruh positif terhadap DDF.

Hubungan DAU dengan Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu Daerah ditentukan atas kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dengan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini sebenarnya daerah yang *fiscal capacitynya* lebih besar dari *fiscal needs* hitungan DAUnya akan negatif.

Untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam membiayai beban pengeluaran yang sudah menjadi tanggung jawabnya, maka perhitungan DAU disamping menggunakan formula *Fiscal Gap* juga menggunakan Faktor Penyeimbang (sesuai PP Nomor 104 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah direvisi dengan PP Nomor 84 Tahun 2001). Dengan adanya Faktor Penyeimbang, alokasi DAU kepada Daerah ditentukan dengan perhitungan formula *Fiscal Gap* dan Faktor Penyeimbang (Sidik, 2002).

Semakin besar DAU maka semakin rendah Derajat Desentralisasi Fiskal. Hal tersebut berarti pula semakin rendah tingkat kemampuan keuangan daerah. Secara umum dari argumentasi diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : DAU berpengaruh negatif terhadap DDF

Hubungan DAK dengan Derajat Desentralisasi Fiskal

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah

lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Sidik, 2002)

Semakin besar DAK maka semakin rendah Derajat Desentralisasi Fiskal. Hal tersebut berarti pula semakin rendah tingkat kemampuan keuangan daerah. Secara umum dari argumentasi diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_3 : DAK berpengaruh negatif terhadap DDF

Hubungan Fiscall Stress dengan Derajat Desentralisasi Fiskal

Tax Effort (index upaya pajak) dapat menunjukkan adanya *fiscall stress* pada suatu daerah. Hal ini disebabkan karena pada saat *fiscall stress* pemerintah cenderung menggali potensi pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto, 2004). Sedangkan menurut Budi Setyawan dan Priyo Hari Adi (2008), upaya pajak (*tax effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil-hasil penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dibanding dengan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat kemampuan keuangan daerah juga bergantung pada upaya pajak, agar ketergantungan dengan Pemerintah Pusat tidak terlalu besar. Penelitian Haryadi (2002) menunjukkan *fiscal stress* secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah krisis. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat kemampuan pembiayaan daerah sebelum krisis relatif lebih besar dibandingkan sesudah krisis, dari segi kemampuan mobilisasi daerah relatif lebih baik sesudah krisis, dari segi tingkat ketergantungan secara relatif menunjukkan perkembangan yang positif sesudah krisis.

Secara umum dari beberapa argumentasi diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$$H_4 : FS \text{ berpengaruh positif terhadap DDF}$$

METODE PENELITIAN

Model Analisis Ekonometrika

Fungsi persamaan DDF = f(PAD, DAU, DAK, FS) ditransformasikan ke dalam modelekonometrika sebagai berikut:

$$DDF_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 FS_{it} + e_{it}$$

Dalam menganalisis data pada tesis ini, penulis menggunakan metode analisis data panel. Dimana data panel merupakan data campuran *cross section* dan *time series*. Penggunaan data panel didasarkan pada kenyataan bahwa data yang tersedia, seriesnya tidak mencukupi untuk dilakukan analisis.

Keterangan :

t	=	Tahun
i	=	Kabupaten/kota
DDF	=	Derajat Desentralisasi Fiskal
α	=	Intercept/konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
FS	=	<i>Fiscal Stress</i>
e_{it}	=	Error Term

Menurut Gujarati (2003), yang menemukan bahwa mengestimasi jenis data paneldengan metode OLS tidak konsisten dan tidak efisien (inefisiensi), sehingga disarankan untuk menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Dimana dalam metode ini dapat dianalisis dengan dua model pendekatan, yaitu *fixed effects model* (FEM) dan *random effects model* (REM). Untuk menentukan model mana yang terbaik dalam metode GLS tersebut, maka dapat dilakukan dengan Uji Hausman, 1978 (Gujarati, 2003).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis Hasil Estimasi dengan *Generalized Least Square* (GLS)

Oleh karena hasil estimasi untuk datapanel dengan menggunakan metode OLS terbukti tidak konsisten dan efisien, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengestimasi dengan metode *Generalized Least Squares* (GLS) seperti yang disarankan oleh Gujarati (2003). Gujarati (2003) mengatakan bahwa untuk data panel, metode *Generalized Least Squares* (GLS) ini adalah lebih baik dan konsisten dibandingkan dengan metode OLS. Hal ini dikarenakan metode GLS dapat dianalisis dengan *fixed effects model* (FEM) dan *randomeffects model* (REM), sehingga dapat diketahui model mana yang terbaik. Berikut ini dapat dilihat hasil estimasi dari kedua model tersebut dengan metode GLS seperti berikut ini.

Tabel 2. Hasil Estimasi GLS (FEM dan REM)

Variabel Terikat : Derajat Desentralisasi Fiskal		
Variabel Bebas	Prob	
	FEM	REM
PAD	0,0000	0,0000
DAU	0,0000	0,0000
DAK	0,0227	0,0222
FS	0,0012	0,00647
R-squared	0,972947	0,576014
Adjusted R-squared	0,965388	0,566038
Durbin-Watson stat	2,030177	1,716278

Sumber : Olahan Peneliti, 2013.

Berdasarkan hasil estimasi dengan metode GLS di atas, *fixed effect model* (FEM) menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan *random effect model*

(REM). Hal ini bisa dilihat dari nilai koefisien regresi dari masing –masing variabel bebasnya dan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, nilai adjusted R – square dan nilai Durbin - Watsonnya yang lebih baik pada *fixed effect model* (FEM) dibandingkan nilai *random effect model* (REM).

Pengujian Model Uji Hausman

Tabel 3: Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	36.140225	4	0.0000

Sumber : Olahan Peneliti, 2013

.Berdasarkan uji Hausman yang dilakukan, didapatkan chi-square statistik sebesar 36,140225 dengan probabilitas 0,0000 pada d.f 4, dengan menggunakan chi-tabel diperoleh nilai sebesar 9,49. Hasil tes menunjukkan bahwa chi-statistik lebih besar daripada chi-tabel dan hasil uji Hausman signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan model terbaik yang dapat digunakan untuk model penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Untuk mengetahui apakah model FEM atau REM yang dipilih, maka digunakan uji Hausman dengan cara membandingkan *Chi-Square statistic* dan *Chi-Square table*. Dengan pengujian hipotesis sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Jika Chi-Square statistic > Chi-Square tabel, atau hasil dari Hausman Test signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian uji Hausman Test melalui Eviews 7 diperoleh hasil sebagai berikut:

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (PAD, DAU, DAK dan Fiscall Stress) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (Derajat Desentralisasi Fiskal). Pengujian ini dilihat dari masing-masing t-statistik dari regresi dengan t-tabel dalam menolak dan menerima hipotesis.

Dalam persamaan, digunakan tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ dengan $df = 175$, maka diperoleh t-tabel = 1,65. Apabila t-statistik > t-tabel maka hipotesis diterima. Dari hasil uji persamaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai t-statistik

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Signifikansi
PAD	4.21E-05	11.44032	0.0000	Signifikan
DAU	-1.20E-05	-9.792200	0.0000	Signifikan
DAK	-3.96E-06	-2.304387	0.0227	Signifikan
FS	0.007665	3.303721	0.0012	Signifikan

Sumber : Olahan Peneliti, 2013.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan uraian sebagai berikut :

Pengujian Hipotesis 1

Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai hitung variabel PAD sebesar 11,44 dengan signifikansi/probability sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H_1 diterima, artinya ada pengaruh yang positif

dan signifikan antara PAD dengan Derajat Desentralisasi Fiskal.

Pengujian Hipotesis 2

Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai hitung variabel DAU sebesar -9,792200 dengan signifikansi/probability sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H_2 diterima, artinya ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara DAU dengan Derajat Desentralisasi Fiskal.

Pengujian Hipotesis 3

Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai hitung variabel DAK sebesar -2,304387 dengan signifikansi/probability sebesar 0,0227 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H_3 diterima, artinya ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara DAK dengan Derajat Desentralisasi Fiskal.

Pengujian Hipotesis 4

Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai hitung variabel Fiscall Stress sebesar 3,303721 dengan signifikansi/probability sebesar 0,0012 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H_4 diterima, artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara *Fiscall Stress* dengan Derajat Desentralisasi Fiskal.

Uji Signifikansi Serentak (Uji F)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari hasil regresi pengaruh PAD, DAU, DAK dan Fiscall Stress terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2007-2011 dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha = 5\%$), dan dengan *degree of freedom of numerator* (dfn) = 3 ($k-1$, =4-1) dan *degree of freedom of denominator* (dfd) = 171 ($n-k$, =175-4), maka diperoleh F-tabel sebesar 2,60. Dari hasil regresi diperoleh F-Statistik sebesar 128,7166 dan nilai probabilitas statistiknya 0,000000 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (PAD, DAU, DAK dan Fiscall Stress) berpengaruh signifikan secara bersama-sama

terhadap variabel dependen (Derajat Desentralisasi Fiskal).

PEMBAHASAN

Interprestasi Model

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan Eviews 7 diperoleh estimasi sebagai berikut :

$$DDF_{it} = 11,77956 + 0,0000421PAD - 0,0000120DAU - 0,00000396DAK + 0,007665FS$$

Dari hasil estimasi diatas dapat dijelaskan pengaruh (peranan) variabel independen terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Peranan PAD terhadap DDF

Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal dan koefisiennya sebesar 0,0000421 artinya apabila PAD 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 1 persen maka Derajat Desentralisasi Fiskal 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 0,0000421 persen (*ceteris paribus*). Artinya PAD mempunyai pengaruh terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi besaran PAD maka Derajat Desentralisasi Fiskal akan semakin tinggi pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ebit Julitawati, Darwanis dan Jalaludin (2011) Kindy Kurniawan (2011), Friska Sihite (2010), Ismy Risky Fitriyanti dan Suryo Pratolo (2009) dan Asha Florida (2006) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

PerananDAU terhadap DDF

Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal dan koefisiennya sebesar - 0,000012 artinya apabila DAU 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 1 persen maka Derajat Desentralisasi Fiskal 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar 0,000012 persen (*ceteris paribus*). Artinya

DAU mempunyai pengaruh terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi besaran DAU maka Derajat Desentralisasi Fiskal akan semakin rendah. Kenaikan Derajat Desentralisasi Fiskal akan mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dan penurunan ketergantungan daerah atas dana perimbangan dari pusat. Adanya pengaruh negatif antara DAU dengan Derajat Desentralisasi Fiskal mengartikan bahwa pada tahun-tahun amatan penelitian telah terjadi peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah serta penurunan besaran dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah yang digambarkan dari besaran dana alokasi umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ebit Julitawati, Darwanis dan Jalaludin (2011), Kindy Kurniawan (2011) dan Friska Sihite (2010) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Peranan DAK terhadap DDF

Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh negatif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal dan koefisiennya sebesar -0,00000396 artinya apabila DAK 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 1 persen maka Derajat Desentralisasi Fiskal 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar 0,00000396 persen (*ceteris paribus*). Artinya DAK mempunyai pengaruh terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi besaran DAK maka Derajat Desentralisasi Fiskal akan semakin rendah. Adanya pengaruh negatif antara DAK dengan Derajat Desentralisasi Fiskal mengartikan bahwa pada tahun-tahun

amatan penelitian telah terjadi peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah serta penurunan besaran dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah yang digambarkan dari besaran dana alokasi khusus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ebit Julitawati, Darwanis dan Jalaludin (2011) yang menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian oleh Kindy Kurniawan (2011) yang menyimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Peranan FS terhadap DDF

Fiscall Stress mempunyai pengaruh positif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal dan koefisiennya sebesar 0,007665 artinya apabila *Fiscall Stress* 35

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 1 persen maka Derajat Desentralisasi Fiskal 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 0,007665 persen (*ceteris paribus*). Artinya *Fiscall Stress* mempunyai pengaruh terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi besaran *Fiscall Stress* maka Derajat Desentralisasi Fiskal akan semakin tinggi pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Friska Sihite (2010) yang menyimpulkan bahwa *Fiscall Stress* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Konstanta Masing-Masing Kabupatenkota

Dari hasil estimasi dengan menggunakan *fixed effect model*, diperoleh koefisien *fixed effect* yang berbeda antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Nilai Konstanta Tertinggi dan Terendah

N 0	KAB/KOTA	KONST.	NO	KAB/KOTA	KONST.
	5 TERTINGGI			5 TERENDAH	
1	KOTA TEGAL	6,983216	1	KOTA PEKALONGAN	-1,661701
2	KOTA SURAKARTA	2,895165	2	KAB. BLORA	-1,812020
3	KOTA SEMARANG	2,234211	3	KABDEMAK	-2,133902
4	KABBANYUMAS	2,137243	4	KABBATANG	-2,375289
5	KABSEMARANG	1,317354	5	KABWONOSOBO	-2,398048

Sumber : Olahan Peneliti, 2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing Kabupaten/Kota memiliki tingkat koefisien *Fixed Effect* yang berbeda antara satu dengan lainnya. Keadaan tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel PAD, DAU, DAK dan *Fiscall Stress* memiliki tingkat pengaruh yang berbeda terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di tiap-tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Koefisien fixed effect tersebut menunjukkan bahwa bila terdapat perubahan satu persen pada PAD, DAU, DAK dan *Fiscall Stress* pada antar daerah maupun antar waktu di Kabupaten/Kota di Prov. Jawa Tengah maka Kabupaten/Kota tersebut akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar koefisien *fixed effectnya*. Kota Tegal mempunyai koefisien fixed effect tertinggi dibandingkan Kab/Kota lain di Prov. Jawa Tengah yaitu dengan koefisien *fixed effect* sebesar 6,983216, itu artinya jika terdapat perubahan satu persen pada PAD, DAU, DAK dan *Fiscall Stress* pada antar daerah maupun antar waktu di Kota Tegal, maka Kota Tegal akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 6,983216 persen. Sedangkan koefisien fixed effect terendah yaitu Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar -2,398048, yang artinya jika terdapat perubahan satu persen pada PAD, DAU, DAK dan *Fiscall Stress* pada antar daerah maupun antar waktu di Kabupaten Wonosobo, maka Kabupaten Wonosobo akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar -2,398048 persen.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis penelitian ini adalah:

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
2. DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
3. DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.

4. *Fiscall Stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
5. Derajat Desentralisasi Fiskal yang paling besar berada di Kota Tegal dan Derajat Desentralisasi Fiskal yang paling rendah di Kabupaten Wonosobo.
6. Model yang terbaik dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menjadi acuan bagi pihak yang terkait, yang memiliki kepentingan dengan Derajat Desentralisasi Fiskal.

Implikasi Manajerial

Dari hasil analisis pada penelitian ini dapat dirumuskan implikasi manajerial sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal, semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka Derajat Desentralisasi Fiskal semakin besar, hal tersebut berarti kemampuan keuangan daerah semakin baik. Oleh karena itu perlu menggali potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah agar pendapatan asli daerah semakin meningkat serta terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan asli daerah yang telah ada.
2. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat tersebut sebaiknya diimbangi oleh penerimaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu tinggi. Sehingga pola hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak bersifat instruktif atau konsultatif seperti yang terjadi saat ini, namun bisa menjadi pola hubungan yang partisipatif atau delegatif karena daerah

- sudah mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
3. *Fiscall Stress* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal, semakin besar *Fiscall Stress* maka Derajat Desentralisasi Fiskal juga semakin besar. *Fiscal Stress* provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Besar kecilnya *Fiscal Stress* sangat dipengaruhi atau sangat tergantung pada besar kecilnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Makin besar penerimaan maka *Fiscal Stress* makin besar pula. Seiring dengan penerapan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerahnya. *Fiscal Stress* yang timbul seiring dengan penerapan otonomi daerah memaksa daerah untuk mengupayakan penerimaan daerahnya yang bersumber dari pajak daerah. Anggaran penerimaan belanja negara (APBN) juga disokong oleh penerimaan pajak sebesar 70%, dan merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Pajak ini juga diharapkan akan menjadi sumber terbesar bagi anggaran penerimaan belanja daerah (APBD). *Fiscal stress* yang timbul seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah menyebabkan daerah harus semakin giat mengupayakan penyerapan pajak daerahnya baik dari ekstensifikasi pajak daerah maupun dari intensifikasi pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 1993, *Sistem Pengendalian Manajemen*, UPP-AMP, YKPN, Yogyakarta.
- Abdul Halim, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP-AMP, YKPN, Yogyakarta.
- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Elmi, Bacrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI- Press. Jakarta.
- Fajar Nugroho dan Abdul Rohman, 2012, Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Florida, Asha. 2007. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis Akuntansi, Fakultas Ekonomi Sumatera Utara, Medan.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Edisi ketiga. Erlangga. Jakarta. 2006.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. Kompak. STIE Yogyakarta.
- Indriantoro & Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE, Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- James, Van Horne, 1986, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kaho, R.J. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Kurniawan, Kindy. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan dengan Belanja Modal*

- Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten dan Kota Propinsi Riau.* Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, www.ekonomirakyat.org
- Mawwood, P. 1983. *Local Government in Third World, The Experience of Trofical of Africa.* John Weley and Sons. New York.
- Nadeak, 2003, *Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara.*
- Nasir, M. Safar, dkk, 2005, *Prosiding Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Pemda.*
- Prastowo dan Julianty, 2002. *Analisa Laporan Keuangan ; Konsep dan Aplikasi*, UPP-AMP, YKPN, Yogyakarta.
- Sidik, M., 2002. *Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Makalah Seminar Nasional Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, Yogyakarta 20 April 2002.
- Sihite, Friska. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dna Kota Provinsi Sumatera Utara.* Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tri Suprpto, 2006. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004.*
- Uma Sekaran, 2003, *Research Methods For Business*, Salemba Empat, Jakarta.
- Winarno, Wing Wahyu. *Analisis Ekonometrika dan Statistik : Eviews.* Yogyakarta : UPP STIE YKPN, 2007.
- www.depdagri.go.id, 2000, *Peraturan Pemerintah no. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.*
- www.depdagri.go.id, 2000, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*
- www.depdagri.go.id, 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.*
- www.depdagri.go.id, 2005, *Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- www.depdagri.go.id, 2007, *Peraturan Pemerintah no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .*
- www.djpk.go.id,